



Konflik-Konflik Sumberdaya Alam di Kalangan Nelayan di Indonesia¹

Rilus A. Kinseng²

Ringkasan

Belakangan ini kaum nelayan di Indonesia sering terlibat dalam konflik sosial yang berkaitan dengan pemanfaatan sumberdaya alam (konflik sumberdaya). Diperkirakan konflik sumberdaya di kalangan kaum nelayan akan semakin sering terjadi di masa yang akan datang, karena potensi sumberdaya perikanan tangkap di Indonesia cenderung berkurang atau semakin langka. Dalam artikel ini akan diuraikan beberapa contoh konflik sumberdaya yang terjadi di kalangan kaum nelayan di Indonesia, dengan mengambil kasus di Balikpapan (Kalimantan Timur). Dijelaskan bahwa dominasi yang bersumber pada perbedaan tingkat teknologi penangkapan merupakan pemicu konflik sumberdaya tersebut.

Katakunci: konflik sumberdaya alam, komunitas lokal, sosiologi komunitas nelayan, konflik antar-pelaku ekonomi, konflik kepentingan, konflik horisontal, konflik internal, konflik eksternal, resolusi konflik.

1. Pendahuluan

1.2. Latar Belakang

Indonesia yang memiliki sekitar 17.500 pulau, dikenal sebagai negara kepulauan (*archipelagic nation*) terbesar di dunia. Selain itu, Indonesia juga merupakan negara maritim karena 75 % dari wilayah Indonesia (5,8 juta km²) merupakan laut. Letak Indonesia juga sangat strategis, yaitu berada di sekitar garis katulistiwa dan di antara dua samudera, yakni Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Oleh sebab itu Indonesia memiliki kekayaan keragaman hayati laut yang tertinggi atau *mega diversity* di dunia (Dewan Hankamnas dan BPP Teknologi, 1996). Dengan potensi sumberdaya kelautan dan perikanan seperti itu, tidak mengherankan jika banyak penduduk Indonesia yang mempunyai mata pencaharian berkaitan dengan kelautan. Salah satu kelompok masyarakat yang sangat tergantung pada sumberdaya kelautan ini adalah kaum nelayan. Dalam Undang-undang Perikanan No. 31 tahun 2004 didefinisikan bahwa “nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan

¹. Artikel ini merupakan bagian dari disertasi penulis yang berjudul “Kelas dan Konflik Kelas pada Kaum Nelayan di Indonesia” (Studi Kasus di Balikpapan, Kalimantan Timur), yang telah dipertahankan di Jurusan Sosiologi FISIP UI, 2007.

². Penulis adalah staf pengajar di Bagian Sosiologi Pedesaan dan Pengembangan Masyarakat pada Departemen Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat IPB dan Departemen Sosial Ekonomi Perikanan IPB. Alamat email: rilus_kinseng@hotmail.com

penangkapan ikan”. Jumlah nelayan di Indonesia cukup banyak, yakni 2.315.787 orang pada tahun 1994, sedangkan pada tahun 2004 naik menjadi 2.935.289 orang (Departemen Kelautan dan Perikanan, 2006).

Para nelayan tidak selalu mempunyai relasi sosial yang harmonis, baik dengan sesama nelayan maupun dengan pihak-pihak lain yang bukan nelayan. Seperti di berbagai tempat lain di dunia, di Indonesia konflik antar nelayan maupun antara nelayan dengan non-nelayan cukup sering terjadi (lihat Ahduri (ed), 2005; Adhuri dan Wahyono, 2004; Kusnadi, 2002; dan Bavinck, 2001). Di era sebelum tahun 1980, konflik antara nelayan “tradisional” dengan nelayan *trawl* sangat sering terjadi, dan seringkali bersifat brutal (*violent*) sehingga memakan korban jiwa yang cukup banyak (Bailey, 1988 dan Betke, 1988). Di Bengkalis, Riau, konflik antar nelayan “tradisional” dan “modern” telah berlangsung lama dan menelan banyak korban jiwa (lihat Shaliza, 2004 dan Hidayat, 2006).

Belakangan ini nelayan yang beroperasi di Selat Makassar nampaknya sedang “bergolak”. Beberapa konflik yang cukup brutal sudah muncul. Sebagai contoh, pada tanggal 16 Januari 2006 yang lalu sebuah kapal *purse seine* KM Mutiara Sakti milik nelayan dari Juwana (Jawa Tengah) dibakar massa nelayan “tradisional” Balikpapan (Kaltim). Sementara itu, pada 22 Januari 2006, kapal *purse seine* Dharma Samudra milik nelayan Tegal, juga dibakar oleh nelayan “tradisional” di daerah Kota Baru (Kalsel).

Mengingat ketersediaan sumberdaya perikanan laut (tangkap) yang kian hari kian berkurang, atau dengan kata lain semakin langka, maka dapat diperkirakan bahwa intensitas konflik sosial di kalangan kaum nelayan di Indonesia ke depan akan semakin meningkat. Ini sejalan dengan pendapat MacNeill *et al* yang mengatakan bahwa “*Conflict based on climate change, environmental disruption, and water and other resource scarcities could well become endemic in the world of the future*” (MacNeill *et al.*, 1991:20). Tidak hanya itu, konflik tersebut mungkin cenderung bersifat brutal pula. Prediksi Homer-Dixon (1999:4) bahwa “*...in coming decades the world will probably see a steady increase in the incidence of violent conflict that is caused, at least in part, by environmental scarcity*”, sangat mungkin terjadi di kalangan kaum nelayan di Indonesia.

Mencermati kondisi perikanan tangkap seperti itu, maka sangatlah urgen untuk melakukan berbagai upaya untuk mengelola konflik di kalangan kaum nelayan, agar konflik tersebut tidak bersifat destruktif. Untuk itu, maka pemahaman yang baik dan mendalam tentang konflik sumberdaya tersebut sangat diperlukan. Dengan demikian, maka penelitian mengenai konflik sumberdaya di kalangan kaum nelayan di Indonesia ini menjadi sangat penting.

1.2. Tujuan

Tujuan penelitian ini adalah untuk menginventarisasi dan mendeskripsikan kasus-kasus konflik sumberdaya yang terjadi di kalangan kaum nelayan di Indonesia, dengan mengambil Balikpapan, Kalimantan Timur, sebagai lokasi kajian. Tentu saja tujuan selanjutnya adalah mencoba membangun suatu teori tentang konflik sumberdaya di kalangan kaum nelayan pada khususnya dan pemanfaatan sumberdaya alam pada umumnya.

1.3. Metode Penelitian

Seperti dikemukakan sebelumnya, artikel ini merupakan bagian dari disertasi penulis, sehingga metode penelitiannya sama dengan metode penelitian untuk disertasi tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif yang dikenal dengan berbagai istilah seperti *field research* (Babbie, 1989; Rose, 1983) atau *field studies* (Marshall and Rossman, 1989) atau *field work* (Rose, 1983).

Data primer-kualitatif dikumpulkan dengan dua cara utama, yakni wawancara dan pengamatan, yang merupakan “*the core, the staple of the diet*” penelitian kualitatif (Marshall and Rossman, 1989:79). Selain penulis sendiri, pengumpulan data kualitatif dibantu oleh seorang asisten yang berada di lapangan selama satu bulan penuh, sedangkan penulis sendiri berada di lapangan selama dua bulan lebih. Data sekunder dikumpulkan dari berbagai sumber, termasuk surat kabar dan dokumen-dokumen lainnya.

Data dianalisis dengan metode *inductive analysis* dan *logical analysis* (Marshall and Rossman, 1989:126). Prosedur analisis data kualitatif ini mengandung dua unsur utama, yakni reduksi data dan interpretasi (Marshall dan Rossman, 1989: 114). Jika menggunakan kategorisasi dari Neuman, data kualitatif ini dianalisis menggunakan kombinasi metode, khususnya *successive approximation* dan *illustrative method* (Neuman, 1997: 427-428).

Penelitian di lapangan dilakukan selama sekitar tiga bulan lebih, dalam rentang waktu sejak bulan Januari 2006 hingga bulan September 2006. Penelitian ini dilaksanakan di Kota Balikpapan, Propinsi Kalimantan Timur.

2. Kasus-Kasus Konflik Sumberdaya Alam di Kalangan Nelayan

Konflik sumberdaya yang terjadi di kalangan kaum nelayan mencakup dua kategori utama, yakni konflik yang terjadi diantara sesama nelayan itu sendiri atau konflik internal, dan konflik antara para nelayan dengan pihak-pihak non-nelayan atau konflik eksternal. Berikut ini akan diuraikan kasus-kasus konflik sumberdaya di kalangan nelayan di Balikpapan, Kalimantan Timur.

2.1. Konflik Internal

2.1.1. Kasus Konflik Nelayan *Mini Trawl*/Dogol dengan Perengge.

Penggunaan *mini trawl* di Balikpapan mulai pada sekitar tahun 1978. Pada tahun 1980 keluar Keppres No. 39/1980 yang melarang penggunaan *trawl* di sebagian besar laut Indonesia. Setelah keluar larangan itu, di Balikpapan pihak

kepolisian seringkali melakukan razia, baik di laut maupun di darat. Hal ini memicu konflik antara sesama nelayan, yakni antara nelayan yang menggunakan *mini trawl* dengan nelayan yang menggunakan rengge (perengge).

Setelah adanya larangan penggunaan *trawl* tersebut, yakni sekitar tahun 1981, pihak Kantor Perikanan Balikpapan memperkenalkan alat yang mirip dengan *mini trawl* yang disebut dogol. Pada masa-masa setelah pelarangan *trawl* tahun 1980 itu seringkali terjadi konflik antara nelayan perengge (yang kebetulan tinggal di Tanjung Kelor) dengan pedogol (yang kebetulan tinggal di seberang Sungai Manggar, yaitu di Manggar Pantai). “Konflik itu cukup parah, sampai bakar-bakaran alat tangkap”, kata seorang tokoh nelayan. *Mini trawl* dan dogol seringkali dibakar oleh nelayan perengge. Para perengge bekerjasama dengan aparat keamanan (polisi) untuk menangkap nelayan yang menggunakan *mini trawl*. Bahkan polisi kadangkala ikut turun ke laut untuk menangkap nelayan yang menggunakan *mini trawl*. Seorang tokoh nelayan yang dulu adalah nelayan perengge dan ikut membakar dogol/*mini trawl* mengatakan bahwa pada sekitar tahun 1985 itu bisa dua atau tiga dogol/*mini trawl* yang dibakar sehari. Jumlah keseluruhan dogol/*mini trawl* yang dibakar waktu itu mencapai sekitar 50 buah. Konflik tersebut baru mereda pada sekitar tahun 1990an. Pada tahun 1990an itu, para nelayan perengge di Tanjung Kelor mulai berpikir, “lebih baik kita pakai dogol juga”, kata tokoh nelayan tersebut.

Menurut seorang tokoh nelayan yang tergolong “pendahulu” di Balikpapan, selain karena adanya larangan penggunaan *trawl* oleh pemerintah, konflik antara nelayan dogol/*mini trawl* dengan nelayan perengge itu juga disebabkan adanya semacam rasa tidak senang dari pihak nelayan perengge. “Pada waktu itu hasil dogol lebih baik, kalah rengge. Akibatnya, mereka merasa tidak senang”, kata tokoh nelayan tersebut. Senada dengan itu, seorang tokoh muda nelayan mengatakan: “Pedogol hasilnya lebih banyak dan bersifat terus-terusan. Kalau rengge sewaktu-waktu memang hasilnya bisa banyak. Jadi ada rasa iri pada pihak perengge terhadap para nelayan pedogol. Ini yang menjadi salah satu pemicu konflik”.

Menurut para informan, konflik-konflik yang terjadi pada masa itu diselesaikan dengan melibatkan pihak aparat keamanan. Keterlibatan pihak aparat keamanan tersebut termasuk dengan cara menangkap nelayan yang menggunakan *mini trawl*/dogol. “Puncaknya, tokoh nelayan Daeng Polo ditangkap”, kata seorang tokoh nelayan. Meskipun konflik terbuka dan brutal antara para pedogol dengan para perengge belakangan ini sudah tidak pernah terjadi, namun sebenarnya potensi konflik antara kedua faksi ini masih cukup besar. Potensi konflik itu lebih besar pada musin selatan, karena para pedogol beroperasi di wilayah pinggir yang merupakan wilayah operasi para perengge. Kesamaan wilayah operasi ini dapat mengakibatkan tertabraknya rengge oleh pedogol. Selain itu, perengge merasa tidak senang

jika pedogol beroperasi terlalu dekat dengan renggenya, karena dianggap akan merugikan dia. Hal-hal seperti inilah yang dapat memicu konflik antara kedua kelompok alat tangkap ini.

2.1.2. Kasus Nelayan Pejala dengan Pebagan Perahu

Potensi konflik antara nelayan pejala dengan nelayan pebagan perahu cukup besar, meskipun sejauh ini belum pernah terjadi konflik terbuka yang bersifat brutal antara kedua kelas ini. Ketegangan bahkan konflik antara kedua kelas nelayan ini biasanya terjadi karena para pejala merasa dirugikan akibat beroperasinya nelayan bagan perahu di dekat rumpon mereka. Dengan teknologi yang lebih canggih, khususnya penggunaan lampu, nelayan pejala kalah bersaing dengan pebagan bilamana bagan perahu itu dioperasikan dekat rumpon. Menurut para pejala, ikan-ikan akan tertarik pada cahaya dari bagan perahu tersebut. Selain itu, meskipun ada ikan di sekitar rumpon, jika ikan-ikan tersebut sudah kena cahaya lampu, maka akan sulit ditangkap. Ikan tersebut menjadi liar, seperti “mabuk”, kata para pejala.

Menurut seorang tokoh pebagan perahu (dia adalah nelayan yang pertama kali menggunakan bagan perahu di Balikpapan), para pejala pernah menentang penggunaan bagan perahu ini. Mereka pernah berdemo pada tahun 2000 dan kemudian tahun 2003. Informasi ini sejalan dengan yang diberikan oleh seorang staf Kantor Perikanan di Balikpapan. Dijelaskan juga bahwa waktu itu telah dibuat kesepakatan antara pejala dengan pebagan mengenai wilayah tangkap (*fishing ground*) dari masing-masing jenis alat tangkap tersebut. Informasi yang sama disampaikan pula oleh beberapa orang nelayan pebagan.

Belakangan ini relasi antara pejala dengan nelayan bagan perahu kembali memburuk. Setelah kasus konflik dengan nelayan *purse seine*, ada beberapa nelayan bagan perahu dari Sulawesi yang beroperasi dekat dengan pejala. Beberapa nelayan pejala sudah sempat “bereaksi panas dan memberi ancaman; kalau mereka tidak mau beroperasi jauh dari rumpon, akan ada tindakan lebih keras”, kata seorang tokoh nelayan (wawancara tgl 10/2/06). Pihak nelayan bagan perahu dinasehatkan untuk tidak beroperasi dekat dengan rumpon nelayan pejala; mereka menuruti sehingga tidak terjadi konflik. Ketegangan yang terbaru antara pejala dengan nelayan bagan perahu di Balikpapan terjadi sekitar (sebelum hingga sesudah) Hari Raya Idul Fitri Oktober 2006 yang baru lalu. Para nelayan pejala mengetahui bahwa nelayan bagan perahu menangkap ikan di rumpon pejala. Hal ini dapat mereka ketahui dari “jenis ikan” yang tertangkap, yang khas berada di sekitar rumpon. Namun ketegangan ini bisa diatasi sehingga tidak sempat pecah menjadi konflik fisik.

Sejauh ini memang konflik antara kedua kelas nelayan ini masih dapat diredam sehingga tidak meledak menjadi konflik kekerasan yang terbuka.

Meskipun sempat muncul ketegangan, namun selalu bisa diatasi dengan cara meminta agar para nelayan bagan perahu tidak beroperasi dekat rumpon agar tidak mengganggu para pejala rumpon. Namun demikian, potensi konflik (konflik laten) antara kedua kelas nelayan ini masih sangat besar, yang sewaktu-waktu dapat meledak.

2.1.3. Kasus Nelayan Pemancing dengan Pembom

Pada tahun 1997 pernah terjadi konflik terbuka antara nelayan pancing dengan nelayan yang menggunakan bom (pembom). Konflik tersebut bermula dari tindakan nelayan pembom yang membom ikan di dekat nelayan pemancing. Nelayan pembom tersebut datang ke dekat nelayan pemancing dan tanpa minta izin terlebih dahulu langsung melempar bom di dekat perahu para pemancing. “Goyang perahu kita”, kata seorang nelayan pemancing yang mengalami peristiwa tersebut. Para nelayan pembom tersebut malah marah pula terhadap nelayan pemancing, dan mau melempar bom ke para pemancing. “Dia yang salah, dia yang marah. Kita mau dilempar bom”, kata nelayan pemancing tadi.

Akibat peristiwa di laut tersebut, maka para pemancing melaporkan kasusnya ke Dewan (DPRD). Satu orang wakil dari para pemancing sudah ke Dewan melaporkan kejadian tersebut. Rupanya hal tersebut diketahui oleh para nelayan pembom, sehingga mereka berencana untuk menyerang para nelayan pemancing. Para nelayan pembom dari berbagai tempat di Balikpapan berkumpul di gang tempat tinggal tokoh nelayan pembom, dan siap menyerang dengan bahan peledak.

Dalam keadaan tegang tersebut, anak-anak dan ibu-ibu atau kaum perempuan di lokasi para pemancing (BTN dan Kampung Nelayan) sempat diungsikan. Sementara itu, lima orang pemancing dari kedua lokasi tersebut nekad menerobos masuk ke lokasi para nelayan pembom yang sedang siap untuk menyerang. Niatnya adalah untuk menghajar pemimpin kelompok nelayan pembom. Para nelayan pemancing juga sudah siap dengan satu mobil untuk membakar tempat pemimpin kelompok nelayan pembom tersebut. Untunglah ketika lima orang nelayan pemancing tersebut tiba di lokasi para nelayan pembom, di sana sudah ada dua orang tokoh yang dihormati oleh para nelayan. Kehadiran kedua tokoh tersebut mampu mencegah terjadinya perkelahian antar kedua kelas nelayan ini. Kelima orang nelayan pemancing tersebut dijemput oleh dua kompi aparat keamanan. Aparat keamanan juga sempat berjaga-jaga di wilayah atau gang tempat berkumpulnya para nelayan pembom tersebut. “Gang Sepakat dan gang Selili diblokade oleh aparat keamanan”, kata seorang informan mengenang kejadian tersebut. Dalam peristiwa itu, enam orang nelayan pemancing sempat ditahan di kantor Polisi di Sepinggan selama satu hari.

2.1.4. Kasus Nelayan “Tradisional” versus Nelayan “Modern”.

Seperti disebutkan sebelumnya, pada tanggal 16 Januari 2006, terjadi konflik yang brutal antara nelayan *purse seine* (modern/besar/kapitalis) dari Juwana, Jawa Tengah, dengan nelayan “tradisional” di Balikpapan. Secara ringkas kronologi dari peristiwa konflik tersebut adalah sebagai berikut.

Pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2006, sebanyak 23 buah kapal *purse seine* nelayan dari Juwana (Jawa Tengah) berada di pelabuhan Telaga Emas, Kampung Baru, Balikpapan Barat. Kehadiran kapal-kapal nelayan dari Juwana tersebut sebenarnya telah meresahkan nelayan “tradisional” di Balikpapan. Keresahan bahkan kemarahan nelayan tradisional tersebut bahkan semakin parah karena sebelumnya, yakni pada tanggal 15 Desember 2005 ada surat pernyataan yang ditandatangani oleh beberapa nelayan *purse seine* dari Pekalongan bahwa mereka tidak akan beroperasi di Selat Makassar. Oleh sebab itu, dengan kedatangan 23 buah kapal motor nelayan *purse seine* dari Juwana tersebut, para nelayan “tradisional” merasa bahwa para nelayan dari Jawa Tengah itu menantang.

Pada Minggu tanggal 15 malam, para nelayan di Manggar (Balikpapan Timur) mengadakan pertemuan (rapat) di TPI Manggar untuk membahas rencana penyerangan terhadap nelayan *purse seine* dari Juwana. Mereka juga sudah menyediakan ratusan liter bensin yang dimasukkan ke dalam botol-botol minuman.

Sementara itu, menurut pihak nelayan dari Juwana, sekitar pukul 07.00 Wita pada hari Minggu tersebut mereka mendapat informasi dari pihak kepolisian (Polres Balikpapan) adanya isu bahwa nelayan dari wilayah Manggar dan Markoni, Balikpapan, akan melakukan tindakan anarkis terhadap nelayan Juwana. Oleh sebab itu, pihak kepolisian memerintahkan agar kapal-kapal nelayan Juwana tersebut harus segera keluar dari pelabuhan Balikpapan saat itu juga. Namun, karena air laut sedang surut, maka kapal-kapal tersebut kandas dan belum bisa segera dibawa pergi dari pelabuhan Balikpapan. Selain itu, proses pemuatan perberbekalan juga belum selesai, dan surat-surat atau dokumen kapal juga belum selesai diproses karena hari libur. Sementara itu, isu bahwa nelayan tradisional Balikpapan akan menyerang berkembang semakin kuat. Oleh sebab itu, maka Polisi Balikpapan melakukan penjagaan sejak menjelang malam pada hari Minggu tersebut. Penjagaan dilakukan oleh sekitar 15 hingga 20 personil dari kepolisian setempat.

Pada hari Senin tanggal 16 Januari 2006, suasana dirasakan oleh para nelayan dari Juwana semakin mencekam. Kapal-kapal mereka yang sudah bisa mengambang (terapung) berusaha menarik kapal-kapal lainnya yang masih kandas agar bisa segera keluar meninggalkan pelabuhan. Pada sekitar pukul 05.00 Wita, kapal-kapal tersebut mulai bisa dibawa keluar dari

pelabuhan dengan pengawasan oleh polisi perairan (Polair). Rombongan pertama yang terdiri dari sembilan kapal berhasil keluar dari Balikpapan dengan selamat. Pada sekitar pukul 05.30 Wita rombongan kedua yang terdiri dari sembilan kapal *purse seine* juga mulai bergerak keluar dengan dikawal oleh sebuah *speed boat* polisi dengan empat orang personilnya, sedangkan di pelabuhan masih ada empat kapal lainnya. Pada rombongan kedua tersebut, kapal Mutiara Sakti berada di paling depan. Setelah berjalan keluar, belum terlalu jauh dari pelabuhan, pada sekitar pukul 06.30, rombongan kapal ini dihadang oleh sekitar 10 buah perahu nelayan lokal yang masing-masing berisi sekitar 10 hingga 15 orang nelayan. Menghadapi kondisi seperti itu, polisi pengawal memerintahkan nakhoda kapal Mutiara Sakti untuk memutar kapal kembali ke pelabuhan. Hal ini dilakukan untuk menghindari massa nelayan yang sudah semakin banyak. Kapal-kapal lain yang berada di belakang KM Mutiara Sakti juga ikut putar haluan, kembali ke pelabuhan sehingga kini KM Mutiara Sakti berada pada posisi yang paling belakang. Massa nelayan lokal terus mengejar KM Mutiara Sakti dan akhirnya berhasil mendekatinya. Peringatan tembakan dua kali yang diberikan oleh polisi tidak dihiraukan oleh massa nelayan lokal. Pada saat itu, para nelayan “tradisional” tersebut melempari KM Mutiara Sakti dengan berbagai benda seperti batu dan botol-botol air minum yang berisi bensin.

Massa nelayan tradisional akhirnya berhasil naik dan masuk ke dalam KM Mutiara Sakti. Wakil nakhoda kapal Mutiara Sakti yang bernama Rb (30 tahun) sempat dipukul oleh nelayan lokal sehingga mengalami cedera (luka) pada pelipis mata bagian kanannya. Selanjutnya, massa nelayan menyiramkan bensin ke berbagai bagian kapal Mutiara Sakti, termasuk ke jaring, kamar mesin, kamar nakhoda, dan bagian-bagian kapal lainnya dan menyulutnya dengan api. Di lain pihak, nakhoda KM Mutiara Sakti memerintahkan kepada seluruh anak buah kapal (ABK) agar tidak mengadakan perlawanan, serta pindah ke bagian depan kapal untuk menghindari api yang sudah mulai berkobar di bagian belakang kapal.

Pada sekitar pukul 08.00 Wita, api mulai membakar kamar yang berada di bagian tengah kapal. Para ABK KM Mutiara Sakti disuruh pindah ke perahu-perahu nelayan lokal oleh massa nelayan dan dibawa ke darat, dimana masyarakat setempat sudah banyak yang datang untuk menyaksikan peristiwa tersebut. KM Mutiara Sakti yang sedang terbakar itu ditarik oleh para nelayan lokal ke arah desa Markoni, dan di sana para nelayan lokal mengelilingi kapal tersebut sambil terus menyiraminya dengan bensin. Akhirnya KM Mutiara Sakti itu karam di perairan Markoni, di depan hotel Dusit.

2.2. Konflik Eksternal

2.2.1. Kasus Penabrakan Perahu dan Alat Tangkap Nelayan.

Laut di sekitar Balikpapan memang sangat ramai dilalui oleh kapal-kapal besar, baik kapal nasional maupun kapal asing, yang datang dan pergi ke Pelabuhan Semayang, Balikpapan. Tingginya frekwensi datang dan perginya kapal-kapal yang melintasi perairan Balikpapan ini membawa dampak tersendiri bagi para nelayan yang beroperasi di perairan sekitar Balikpapan. Salah satunya adalah seringnya terjadi penabrakan perahu dan alat tangkap nelayan oleh kapal-kapal yang lewat tersebut. Data dari Administrasi Pelabuhan (Adpel) menunjukkan bahwa selama tahun 2002 hingga 2003 ada sebanyak 13 kasus penabrakan yang dilaporkan oleh nelayan, sedangkan tokoh nelayan Ruslan Riva'i mencatat ada 24 kasus penabrakan yang terjadi dalam kurun waktu 2000 hingga 2004 (Riva'i, 2006). Jenis alat tangkap yang ditabrak terutama adalah bagan tancap, jaring dogol, rengge, dan juga perahu nelayan itu sendiri.

Kasus-kasus penabrakan terhadap alat tangkap maupun perahu nelayan itu dapat dikatakan sebagai awal munculnya gerakan perjuangan kolektif kaum nelayan di Balikpapan, khususnya di wilayah Manggar dan sekitarnya. Pada tanggal 5 November 1999 beberapa tokoh nelayan mengadakan pertemuan untuk membahas masalah penabrakan ini. Dalam pertemuan itu disepakati untuk membawa kasus penabrakan itu ke DPRD. Di lain pihak, pada masa itu masih berlaku Surat Keputusan (SK) Gubernur Kalimantan Timur No.75/1973 yang melarang pengoperasian bagan tancap di wilayah Balikpapan. Oleh sebab itu, selain menuntut pertanggungjawaban perusahaan yang menabrak perahu dan alat tangkap nelayan, mereka juga menuntut agar Walikota mengeluarkan surat keputusan yang melegalkan penggunaan bagan tancap di perairan Balikpapan.

Dalam rangka membawa kasus penabrakan itu ke DPRD, maka para nelayan tadi menghimpun tanda tangan dari para nelayan lainnya sebagai bentuk dukungan, serta menunjuk 30 orang nelayan sebagai perwakilan yang akan datang ke DPRD. Untuk keperluan identitas, mereka sepakat untuk menamakan diri sebagai Amanat Aliansi Masyarakat Nelayan (AAMN). Akhirnya pada tanggal 11 November 1999 kelompok nelayan tersebut mendatangi kantor DPRD dan diterima oleh Komisi B dan Komisi E. Pertemuan itu dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD.

Selanjutnya, pada tanggal 11 April tahun 2000, sekitar 150 orang nelayan atas nama AAMN kembali mendatangi kantor DPRD. Tuntutan yang diajukan masih seputar meminta pertanggung jawaban kapal/ponton yang menabrak perahu dan alat tangkap nelayan serta pencabutan SK Gubernur yang melarang bagan tancap. Namun rupanya kapal-kapal dan ponton masih lalu lalang melintasi wilayah operasi nelayan, sedangkan SK Gubernur tak kunjung dicabut juga. Akhirnya pada tanggal 20 April tahun 2000 para nelayan melakukan aksi dengan cara mencegat tiga buah kapal

yang melalui wilayah operasi mereka. Setelah tiga hari “disandera”, akhirnya ketiga kapal itu dikembalikan, namun surat-suratnya masih ditahan oleh nelayan. Selanjutnya para nelayan untuk yang ketiga kalinya mendatangi DPRD kembali. Kali ini mereka “disambut” dengan mengadakan rapat yang dihadiri oleh semua komisi DPRD serta pihak-pihak lainnya, seperti Cabang Dinas Perikanan, Adpel, Polairud, Kabag Hukum Pemkot Balikpapan, dan beberapa perusahaan pemilik kapal ponton. Sebagai hasil dari pertemuan itu, selain dilakukan ganti rugi terhadap beberapa nelayan, akhirnya SK Gubernur tentang pelarangan bagan tancap juga dicabut pada bulan April 2000 tersebut. Selanjutnya Walikota mengeluarkan SK No. 188/2000 tentang pengakuan keberadaan bagan tancap di wilayah perairan Balikpapan.

2.2.2. Kasus Pembangunan Dermaga PT THS.

PT THS merupakan sebuah perusahaan pertambangan multinasional besar yang mempunyai kantor di Balikpapan. Sejak Juni 2004 hingga April 2005 PT THS mengerjakan proyek pembangunan dermaga di belakang kantornya. Dalam pembangunan dermaga itu dilakukan pengerukan pasir sepanjang jalur yang akan digunakan oleh PT THS untuk membawa alat-alat berat ke dermaga tersebut. Para nelayan kecil, khususnya pedogol, merasa sangat dirugikan oleh kegiatan pembangunan dermaga ini, baik berupa hilangnya wilayah tangkapan (*fishing ground*) mereka maupun rusak atau hilangnya alat tangkap mereka. Oleh sebab itu, para nelayan di Manggar menuntut ganti rugi kepada PT THS. Proses negosiasi antara nelayan dengan PT THS ini berjalan sangat alot dan lama. Untuk memperjuangkan kepentingan dan tuntutan mereka, para nelayan membentuk “Forum Bersama Nelayan Korban THS” (FBNKT).

Pertemuan antara nelayan dan PT THS dilakukan berkali-kali. Pada tanggal 4 Maret 2005, misalnya, diadakan pertemuan di Hotel Bahtera antara nelayan dengan PT THS, yang dihadiri oleh Wakil Walikota, anggota DPRD, Kapolsek, Danramil, dan Camat. Selanjutnya, pada tanggal 23 Maret diadakan lagi pertemuan yang bertempat di Kecamatan Balikpapan Timur. Pada tanggal 26 April 2005 kembali diadakan pertemuan antara perwakilan para nelayan dengan PT THS.

Sesudah tujuh bulan para nelayan menunggu realisasi janji penggantian dan sesudah lima kali diadakan pertemuan tanpa hasil, akhirnya pada hari Senin tgl 20 Juni 2005 yang lalu sekitar 300-an nelayan melakukan demo di kantor PT THS, Balikpapan. Tidak tanggung-tanggung, mereka menuntut ganti rugi sebesar 1 milyar rupiah sebagai kompensasi atas hilangnya wilayah tangkapan (*fishing ground*) mereka akibat kegiatan pengembangan dermaga PT THS. Selain itu, mereka juga menuntut ganti rugi atas alat tangkap mereka yang rusak atau hilang akibat kegiatan PT THS tersebut. Dalam

aksi demo itu para nelayan sempat melempari kantor PT THS dengan telur. Wakil Walikota Balikpapan H. Mukmin Faisyal datang ke tempat aksi demo itu dan meminta para nelayan untuk tidak berbuat anarkis, serta meminta waktu selama seminggu untuk menyelesaikan kasus ini. Setelah berorasi cukup lama, akhirnya para nelayan melakukan dialog dengan pihak PT THS, yang dihairi juga oleh Wakil Walikota, Kapolres, Camat Balikpapan Timur, Lurah Manggar, serta sejumlah anggota DPRD Balikpapan.

Sebagai tindak lanjut dari demo itu, pada tanggal 21 Juni 2005 dilakukan pertemuan di kantor Walikota untuk membahas masalah tuntutan nelayan tersebut. Pertemuan ini antara lain dihadiri Wakil Walikota, anggota DPRD, Kapolsek Balikpapan Timur dan Selatan, Kepala Kantor Perikanan dan Kelautan, dll.

Meskipun telah dilakukan berbagai upaya, namun pihak nelayan masih belum mendapatkan ganti rugi. Pada tanggal 12 Februari 2006 pihak nelayan melalui AMN mengirimkan surat kepada PT THS menanyakan kelanjutan proses itu. Surat itu dijawab oleh PT THS pada tanggal 30 Mei 2006 yang menyatakan antara lain bahwa tuduhan nelayan kepada PT THS tidak terbukti, sehingga PT THS tidak berkewajiban memberikan ganti rugi seperti yang dituntut oleh para nelayan. PT THS juga menyatakan bahwa upaya penyelesaian kasus ini telah dilakukan dengan perantaraan Wakil Walikota.

Dengan demikian, meskipun perjuangan panjang sudah dilakukan, namun hasilnya masih belum jelas. Pada bulan Januari 2007 bahkan terjadi konflik antara kelompok nelayan karena masalah tuntutan ganti rugi ke PT THS ini. Dalam peristiwa ini ada yang dipukul, ada yang ditikam dengan pisau, dan rumah seorang tokoh nelayan dihancurkan oleh nelayan lainnya. Konflik ini ditangani oleh Kapolresta Balikpapan.

2.2.3. Kasus Seismik Perusahaan Multinasional Uncl

Para nelayan di Balikpapan, khususnya nelayan pejala, pernah mengalami konflik yang cukup hebat dengan perusahaan pertambangan multinasional Uncl. Konflik ini berawal dari proses survei seismik yang dilakukan oleh pihak Uncl pada tanggal 15-22 Juli 2004, di wilayah penangkapan ikan para nelayan pejala. Dalam proses survei seismik itu, beberapa puluh rumpon nelayan di Balikpapan dipotong oleh pihak Uncl. Inilah yang menjadi pokok persoalan yang dilawan oleh para nelayan, dengan meminta ganti rugi dari pihak Uncl.

Proses ganti rugi ini berjalan cukup panjang dan alot. Menurut seorang tokoh nelayan yang menjadi salah satu pemimpin dalam negosiasi dengan pihak Uncl, mereka melakukan demo atau pertemuan sebanyak tiga kali ke DPRD, satu kali ke Pemkot, dan satu kali demo ke kantor Uncl. Sebagai contoh, pada hari Selasa, 28/9/04 dilakukan rapat gabungan antara DPRD,

perwakilan Uncl dan para nelayan yang didampingi AMN bertempat di gedung DPRD. Mereka menuntut agar pembayaran ganti rugi segera dilakukan (*Tribun Kaltim*, 29/9/04, *Post Metro Balikpapan*, 29/9/04). Selanjutnya, pada hari Selasa tgl 28 Desember 2004 ratusan nelayan melakukan demonstrasi ke kantor Uncl untuk menuntut ganti rugi. Dengan didampingi Kapolresta Balikpapan, akhirnya lima orang wakil nelayan diterima untuk berdialog dengan pihak Uncl (*Tribun Kaltim*, 29/12/04). Sementara itu, pada hari yang sama para nelayan yang tergabung dalam Serikat Nelayan Balikpapan (SNB) juga melakukan perlawanan terhadap kegiatan seismik Uncl dengan cara memblokir kapal milik kontraktor Uncl yang digunakan dalam kegiatan seismik itu. Kapal tersebut digiring kembali ke jembatan di dekat TPI Manggar (*Kaltim Post*, 30/12/04). Mereka menuntut Uncl untuk memberikan ganti rugi bagi para nelayan yang terganggu usahanya selama kegiatan seismik.

Melalui proses negosiasi yang panjang itu, akhirnya pihak Uncl setuju memberikan ganti rugi. Ganti rugi diberikan sebesar Rp 12 juta kepada per nelayan untuk 41 orang nelayan, sedangkan 14 orang nelayan lainnya masing-masing mendapat Rp 14 juta. Ganti rugi ini diberikan pada awal tahun 2005.

3. Analisis Singkat

Dalam analisis ini pertama akan dibahas konflik internal yang terjadi antara sesama nelayan. Jika dikaji secara mendalam, maka kasus-kasus konflik antara sesama nelayan di Balikpapan menunjukkan beberapa ciri yang sama. Umumnya konflik-konflik tersebut terjadi antara dua kelompok nelayan yang menggunakan jenis alat tangkap yang berbeda. Namun sebenarnya persoalan pokoknya bukan terletak pada perbedaan jenis alat tangkap itu sendiri. Pada umumnya, perbedaan alat tangkap yang memicu konflik adalah perbedaan yang mengandung unsur hierarkis: ada yang lebih “superior” dan ada yang lebih “inferior” dalam kemampuannya mengeksploitasi sumberdaya alam. Dalam hal ini, perbedaan tingkat teknologi yang kecil saja sudah bisa memicu konflik.

Secara sosiologis, adanya superioritas vs inferioritas dalam “proses produksi” perikanan tangkap ini berarti ada dominasi satu kelompok nelayan atas kelompok nelayan yang lain. Inilah sesungguhnya yang menjadi inti persoalan yang memicu sebagian besar konflik sosial dalam pemanfaatan sumberdaya alam di kalangan kaum nelayan di Indonesia.

Dalam konteks ini, maka konsep jarak dominasi menjadi penting. Jarak dominasi merupakan jarak spasial dimana dominasi nelayan “kelas atas” terhadap nelayan “kelas bawah” masih terjadi. Panjangnya jarak dominasi ini tergantung pada tingkat kecanggihan teknologi nelayan yang lebih superior (kelas atas). Sebagai contoh, menurut para nelayan di Balikpapan,

pada jarak lima mil, pengaruh nelayan *purse seine* masih sangat terasa. Dengan kata lain, jarak dominasi nelayan *purse seine* itu lebih dari lima mil.

Adanya dominasi dalam proses produksi ini terkait erat dengan sifat sumberdaya perikanan tangkap itu sendiri. Dalam perikanan tangkap, pada dasarnya ikan dan sejenisnya merupakan *common property*, dan jumlah anggota *the common* tersebut umumnya sangat banyak. Selanjutnya, dari segi teritorial atau lautpun, di Indonesia dalam prakteknya juga merupakan *common property* dengan jumlah anggota *the common* yang sangat banyak: laut adalah milik semua orang Indonesia.

Dengan sifat sumberdaya perikanan dan kelautan yang demikian, maka nelayan “kecil” dan nelayan “besar” sama-sama “mengambil” ikan dari sumber yang saling berhubungan erat satu sama lain, bahkan dari *fishing ground* yang sama. Dalam kondisi seperti itu, maka seperti kata Bailey “...*the situation in fisheries is even worse than in agriculture because fishers directly compete with one another over a finite resource*” (Bailey, 1988:26). Ini akan mendorong terjadinya *the tragedy of the commons* yang dikemukakan oleh Garrett Hardin itu (Hardin, 1970). Dalam perebutan sumberdaya ini, tentu saja para nelayan kecil kalah bersaing dengan para nelayan besar/modern. Kembali mengutip Bailey, “...*fisheries...in Indonesia has become a zero-sum game, where those who control the most powerful technologies have a clear competitive advantage and individually prosper, even as others are swept aside and fish stocks depleted*” (Bailey, 1988:26). Akibatnya, seperti kata Betke, “*Finding themselves trapped in an increasingly hopeless situation, Indonesian fishermen eventually rebelled and desperately counter-attacked the representative of a modernization that threatened their survival*” (Betke, 1988: 59). Prinsip ini berlaku pada berbagai tingkat atau level dan gap kecanggihan teknologi penangkapan.

Dari kasus di Balikpapan ini dapat diprediksi bahwa setiap kali ada perbedaan tingkat teknologi penangkapan yang digunakan oleh nelayan di wilayah penangkapan yang sama atau berdekatan, maka akan selalu terjadi dominasi nelayan yang lebih canggih atas nelayan yang kurang canggih teknologinya. Selanjutnya, dimana ada dominasi satu kelompok nelayan oleh kelompok nelayan yang lain, maka di situ cenderung akan terjadi konflik sosial. Meskipun tidak terjadi konflik sosial yang terbuka, namun dominasi itu tetap menyimpan potensi konflik (konflik laten) yang setiap saat dapat berubah menjadi konflik terbuka.

Yang kedua adalah konflik eksternal. Meskipun kasus konflik eksternal yang terjadi pada kaum nelayan di Balikpapan cukup beragam, namun sesungguhnya konflik-konflik eksternal tersebut mempunyai kesamaan, jika dilihat dari inti permasalahan yang memicu konflik tersebut. Inti permasalahan itu adalah terganggunya kegiatan usaha para nelayan, yang pada gilirannya menyebabkan pendapatan mereka menurun. Dengan kata lain, di sini juga terjadi marginalisasi kaum nelayan oleh kekuatan dominan di luar nelayan.

Dari analisis yang singkat ini dapat pula dikatakan bahwa baik konflik internal maupun konflik eksternal yang terjadi pada kaum nelayan di Balikpapan mempunyai inti persoalan pemicu konflik yang sama. Persoalan pokok dalam kegiatan pemanfaatan sumberdaya alam di kalangan kaum nelayan tersebut adalah terganggunya usaha atau mata pencaharian nelayan, yang pada gilirannya menyebabkan penurunan pendapatan mereka. Penurunan pendapatan ini berakibat pada memburuknya kehidupan atau meminjam istilah Weber, "*life-chances*" para nelayan tersebut (Weber, 1978; Hamilton and Hirschowitz, 1987). Jadi, dengan meminjam istilah Cordell, persoalan pokok yang memicu konflik ini menyangkut "*core of fishermen's livelihood*" sehingga "*they are worth fighting over either on the water or in court*" (dikutip oleh Bavinck, 2001: 24).

Dari segi kebrutalan (*violence*) konflik, kasus konflik sumberdaya di kalangan kaum nelayan di Balikpapan ini menunjukkan bahwa meskipun isu suatu konflik itu bersifat realistic, tetapi konfliknya bisa saja bersifat brutal (*violent*), ketika isunya menyangkut masalah sumber kehidupan ("masalah perut", istilah para nelayan). Jadi, tingkat kebrutalan konflik bukan hanya ditentukan oleh realistik tidaknya isu konflik itu seperti yang dikatakan oleh Coser (Coser, 1956 dan Turner, 1998), tetapi juga apakah isunya menyangkut masalah sumber penghidupan atau tidak. Selain itu, kebrutalan konflik juga dipengaruhi oleh berlarut-larutnya tidaknya penyelesaian konflik tersebut, dan apakah upaya-upaya damai yang dilakukan itu ditanggapi oleh pihak lawan maupun otoritas penguasa secara serius atau tidak. Penyelesaian yang berlarut-larut cenderung memicu konflik kekerasan. Sementara itu, jika jalan damai tidak berhasil, maka pihak yang merasa dirugikan cenderung akan mengambil jalan kekerasan. Ini sejalan dengan pendapat White (1989).

4. Kesimpulan dan Saran

4.1. Kesimpulan

Dari uraian di atas dapat diambil beberapa kesimpulan, yakni:

- 1). Konflik sosial antara sesama nelayan seringkali terjadi antara nelayan dengan tingkat "kemajuan" teknologi yang berbeda. Kesenjangan teknologi ini menyebabkan terjadinya dominasi nelayan yang lebih "kecil" atau "tradisional" oleh nelayan yang lebih "besar" atau "modern" dalam proses penangkapan.
- 2). Para nelayan seringkali menghadapi dominasi kekuatan eksternal yang mengganggu bahkan menghancurkan sumberdaya alam yang merupakan sumber hidup atau mata pencaharian mereka. Hal ini akan memicu munculnya konflik eksternal atau konflik antara nelayan dan pihak-pihak non-nelayan.
- 3). Dalam perjuangan (*struggle*) untuk mempertahankan hak dan kehidupannya, para nelayan di Balikpapan mampu melakukan berbagai strategi

mulai dari dialog damai, demo, penyanderaan, hingga pembakaran. Dengan kata lain, dalam melakukan perjuangan, para nelayan bisa mengambil jalan damai maupun jalan kekerasan.

4). Tingkat kebrutalan (*violence*) konflik dipengaruhi oleh apakah isu konflik tersebut menyangkut masalah sumber penghidupan atau tidak. Jika isunya menyangkut sumber penghidupan, meskipun bersifat realistik, cenderung mengakibatkan konflik yang brutal. Selain itu, kebrutalan konflik juga dipengaruhi oleh proses penyelesaiannya. Jika proses penyelesaiannya berlarut-larut dan jalan damai tidak berhasil, maka konflik cenderung brutal.

4.2. Saran

Berdasarkan uraian di atas, maka diajukan beberapa saran berikut:

1). Mengingat salah satu sumber konflik antara sesama nelayan adalah adanya dominasi nelayan “besar” terhadap nelayan “kecil”, maka untuk mengurangi konflik sosial jenis ini dominasi tersebut harus dihapus atau diminimalkan. Hal ini dapat dilakukan dengan mengatur zona penangkapan. Dalam mengatur zona ini perlu diperhatikan masalah jarak dominasi.

2). Untuk mengurangi kompetisi langsung antara banyak nelayan dengan berbagai tingkatan teknologi, maka perlu diberikan pengakuan secara legal hak khusus sekelompok nelayan terhadap wilayah tangkap tertentu. Bahkan pemberian status *property right* kepada kelompok nelayan atas teritorial tertentu seperti yang berlaku di Jepang, perlu dikembangkan. Di Jepang, seperti dikatakan oleh Ruddle (1987), “*No conceptual distinctions exist between land holdings, or land tenure, and sea holdings, or sea tenure. And as is unambiguously set forth in the Civic Code, fisheries enjoy a legal status equal to that of land ownership*”. Dalam konteks ini, langkah awal yang perlu adalah pengakuan secara legal atas “hak pemanfaatan tradisional” nelayan lokal di setiap daerah.

3). Jika para nelayan dibiarkan bersaing satu dengan yang lain tanpa “wasit”, maka yang terjadi adalah “Darwinisme sosial” atau *survival of the fittest*. Oleh sebab itu, maka perlu ada suatu institusi yang bertindak sebagai “wasit” yang mengatur kegiatan usaha kaum nelayan. Untuk itu perlu dibentuk “badan pengawas usaha penangkapan” (BPUP) di semua tingkatan pemerintahan (pusat, provinsi, dan kabupaten/kota).

4). Dalam rangka menghadapi kekuatan eksternal, khususnya pihak-pihak non-nelayan seperti perusahaan pertambangan, transportasi, dsb, maka organisasi nelayan perlu dibangun dan diperkuat.

5). Penyelesaian konflik sebaiknya dilakukan secepat mungkin, agar tidak berlarut-larut. Selain itu, upaya-upaya penyelesaian damai oleh pihak yang berkonflik perlu ditanggapi secara sungguh-sungguh, agar mereka tidak mengambil jalan kekerasan

Daftar Rujukan

- Adhuri, D. S. dan Wahyono, A. 2004. Konflik-konflik Kenelayanan: Distribusi, Pola Akar Masalah dan Resolusinya. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan PMB-LIPI, Jakarta.
- Adhuri, D. S (*ed*). 2005. Fishing In, Fishing Out: Memahami Konflik-konflik Kenelayanan di Kalimantan Timur dan Nusa Tenggara Timur. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan PMB-LIPI, Jakarta.
- Babbie, E. 1989. The Practice of Social Research (Fifth Ed). Wadsworth Publishing Company, Belmont, California.
- Bailey, C. 1988. "The Political Economy of Marine Fisheries Development in Indonesia". Indonesia No. 46 (Oct). Cornell Southeast Asia Program.
- Bavinck, M. 2001. Marine Resource management. Conflict and Regulation in the Fisheries of the Coromandel Coast. Sage Publication. London and New Delhi.
- Betke, F. 1988. Prospect of a "Blue Revolution" in Indonesian Fisheries: A Bureaucratic Dream or Grim Reality? Disertasi, Bielefeld University. Bielefeld.
- Coser, L. 1956. The Functions of Social Conflict. The Free Press
- Departemen Kelautan dan Perikanan, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap. 2006. Statistik Perikanan Tangkap Indonesia - 2004. Jakarta.
- Dewan Hankamnas dan BPP Teknologi, 1996. Benua Maritim Indonesia.
- Hamilton, M and Hirszowicz, M. 1987. Class and Inequality in Pre-Industrial, Capitalist and Communist Societies. Wheatsheaf Books-Sussex, St. Martin's Press-New York.
- Hardin, G. 1970. "The Tragedy of the Commons" *dalam* Garret de Bell (Ed), 1970. The Environmental Handbook. Prepared for the First National Environmental Teach-In. Ballantine Books Inc., Intext Publisher, New York.
- Hidayat, M. T. 2006. Takkan Pernah Putus Asa. Nelayan Bengkalis Melawan Jaring Batu *dalam* M. Imran Amin dkk (Penyunting), 2006. Meninggalkan Titik Nol. Nelayan Melawan Perlakuan Buruk. Jaring Pela&CBCRM-RC.
- Homer-Dixon, T. F. 1999. Environment, Scarcity, and Violence. Princeton University Press, Princeton, New Jersey.

- Kinseng, R. A. 2007. Kelas dan Kelas Konflik pada Kaum Nelayan di Indonesia (Studi Kasus di Balikpapan, Kalimantan Timur). Disertasi, Departemen Sosiologi, FISIP, UI.
- Kusnadi, 2002. Konflik Sosial Nelayan. Kemiskinan dan Perebutan Sumberdaya Perikanan. LKIS, Yogyakarta.
- MacNeil, J; Winsemius, P and Yakushiji, T. 1991. Beyond Interdependence. The Meshing of the World's Economy and the Earth's Ecology. Oxford University Press, New York, USA.
- Marshall, C and Rossman, G. B. 1989. Designing Qualitative Research. Sage Publication. London.
- Neuman, W. L. 1997. Social Research Methods. Qualitative and Quantitative. Approaches (Third Edition). Allyn and Bacon.
- Riva'i, R. 2006. Menggugat Penabrak di Laut. Nelayan Balikpapan Membangun Gerakan *dalam* M. Imran Amin dkk (Penyunting), 2006. Meninggalkan Titik Nol. Nelayan Melawan Perlakuan Buruk. Jaring Pela&CBCRM-RC.
- Rose, G. 1983. Deciphering Sociological Research. Sage Publication, Inc. Beverly Hills/London/New Delhi.
- Ruddle, K. 1987. Administration and Conflict Management in Japanese Coastal Fisheries. FAO Fish. Tech. Pap., (273):93 p.
- Shaliza, F. 2004. Dinamika Konflik Antar Komunitas dan Transformasi Modal Sosial (Studi Kasus Konflik antara Komunitas Nelayan Parit III dan Melati di Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau). Tesis Magister Sains pada Program Studi Sosiologi Pedesaan, Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor.
- Turner, J. H. 1998. The Structure of Sociological Theory (Fifth Ed), Wadsworth Publishing Company. Belmont, California.
- Weber, M. 1978. Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology (Vol 1 and 2). Edited by Guenter Roth and Clauss Wittich. University of California Press, Berkeley-Los Angeles-London.
- White, R. W. 1989. From Peaceful Protest to Guerrilla War: Micromobilization of the Provisional Irish Republican Army. *American Journal of Sociology*, Vol.94, No.6, May 1989.

Berita Surat Kabar:

Tribun Kaltim, 29-12-2004. Nelayan Tuntut Ganti Rugi Rumpon.

Tribun Kaltim, 29-9-2004. Ganti Rugi Rumpon Berlarut-larut

Kaltim Post, 30-12-2004. SNB Blokir Kapal Seismik

Post Metro Balikpapan, 29-9-2004. Dewan Desak Uncl Bayar Kompensasi